

**MANAGEMENT OF PUBLIC ROADSIDE PARKING BY THE  
TRANSPORTATION DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND  
INFORMATICS PEKANBARU IN 2013**

*By*

***Muhammad Ridwan***  
***Supervisor : Drs. H. Isril, MH***

**Jurusan Ilmu Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761- 63277**

**ABSTRACT**

*Pekanbaru City as Cipil Town of Riau Province has a high traffic degree. That's why, Pekanbaru needs enough parking area with a good management. Indonesian Constution allowed activities on public roadside parking based on traffic sign. But in fact, the implementation doesn't works effectively because so many illegal parking area with illegal retributions. It's make a cause to diminution of native territorial income that never rich the goal. One of the unsolved problems until today such as on public roadside parking of Tuanku Tambusai street and throughout the front of Cik Puan Market that makes traffic jam.*

*This research is supposed see the management constitution implementations of public roadside parking from Dishubkominfo Pekanbaru city. Management theory is a base to this qualitative research. Based on analysis from the writer, the ineffectively management implementations is because of Parking UPTD of Dishubkominfo doesn't have a written management and programs planning. Parking UPTD of Dishubkominfo can not acting explicitly because still have a good parking area to solve the problems.*

*Key words : Management, Public Roadside Parking, Pekanbaru city.*

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan pembangunan yang terus berjalan akan mempengaruhi aktifitas masyarakat. Kehidupan sebuah kota tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana layanan publik sebagai pendukung sebagai kebutuhan masyarakat (Pontoh dan Kustiwan, 2009:108). Pemerintah harus mampu memperhatikan pengelolaan pembangunan infrastruktur salah

satunya halaman parkir sebagai kebutuhan alat transportasi yang berkenaan bagi penataan ruang kota yang berdampak terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru pada pasal 244 (2) menyebutkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan orang atau badan. Dalam rangka menanggulangi kemacetan lalu lintas dan pengelolaan layanan parkir Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran (UPTD Perparkiran) sebagai aparat penyelenggaraan kewenangan dibidang pelaksanaan teknis operasional perparkiran dan ketertiban perparkiran. Dari keseluruhan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru, UPTD Perparkiran mengelola dengan menunjuk pihak ketiga (perorangan atau badan) dalam mengelola penyelenggaraan perparkiran..

Ruang parkir yang tersedia di tepi jalan umum semakin padat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas karena sudah tidak memiliki lagi tempat untuk parkir. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 43 yang berbunyi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dalam rambu lalu lintas dan /atau marka jalan.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Daerah Provinsi Riau yang menjadi tempat pusat perdagangan dan perkantoran yang seharusnya memiliki

tata kelola ruang yang baik sehingga menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Namun, kenyataannya banyak terdapat kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Contoh lokasi yang sering terjadi kemacetan di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di kawasan depan Mall Pekanbaru, parkir liar di Jalan Pepaya, didepan Plaza Citra, serta parkir Jalan Tuanku Tambusai tepatnya di kawasan Pasar Cik Puan.

Selain itu terdapat juru parkir liar yang memungut retribusi parkir sesukanya yang tidak sesuai dengan aturan diperaturan daerah. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat bahwa tarif parkir di tepi jalan umum untuk sepeda motor Rp 1000,- sedangkan dalam praktiknya banyak petugas parkir memungut Rp 2000,- bahkan Rp 3000,- per kendaraan bermotor.

Permasalahan parkir sudah menjadi sangat kompleks, masalah lainnya dapat dilihat penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum terjadi penurunan target penerimaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Ini terlihat dari tabel berikut ini.

#### **Daftar Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2011-2013**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2011	Rp 5.799.996.000	Rp 4.983.487.000	85,5%
2	2012	Rp 5.799.996.000	Rp 5.152.778.000	88,8%
3	2013	Rp 7.000.000.000	Rp 5.353.190.000	76,5%

Sumber : *Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (UPTD Parkir) tahun 2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum

belum pernah mencapai target dari tahun ke tahun pada tahun 2011-2013. Dengan adanya aturan-aturan yang jelas

dalam mengatur pengelolaan parkir Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya memiliki kekuatan untuk mewujudkan kondisi yang rapi dan tertib bagi masyarakat.

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Manajemen Parkir Tepi Jalan umum Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun 2013”**.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini ialah mengapa manajemen parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum berjalan efektif ?

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk melihat pelaksanaan manajemen parkir tepi jalan umum yang belum efektif oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru khususnya di bagian UPTD Parkir.

## KONSEP TEORI

Melihat permasalahan-permasalahan yang terkait dalam hal manajemen, adapun teori yang digunakan penelitian ini antara lain :

### A. Manajemen

Taliziduhu Ndraha dalam bukunya *Kybernologi manajemen* merupakan cara bagaimana menciptakan *effeciveness* usaha (*doing righ hings*) secara efisien (*doing hings righ*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Melayu S.P. Hasibuan Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Terry dan Rue (2001:1) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengerahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Terry dan Rue menegaskan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan manajemen bersifat tidak dapat diraba namun hasil dari tujuan tersebut tentunya jelas dan obyektif. Manajemen dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak nyata, namun dapat dibuktikan dari hasil-hasil yang ditunjukkannya melalui hasil kerja yang memadai, rasa puas yang dirasakan, dan hasil-hasil produksi serta jasa yang bisa dinikmati secara baik.

George Terry mengklasifikasikan manajemen menjadi 4 fungsi manajerial yaitu :

1. *Planning* (perencanaan) adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.
2. *Organizing* (pengorganisasian) adalah suatu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok (Terry, 2012:82)
3. *Actuating* (pelaksanaan) atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang

ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai (Terry, 2009: 17)

4. *Controlling* (pengawasan) adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities* (Stoner, Freeman, & Gilbert. 1955)

#### B. Manajemen Pemerintah Daerah Rahardjo Adisasmita

mengatakan manajemen pemerintah daerah sangat luas aspeknya, meliputi reformasi sistem, prosedur, dan mekanisme pemerintahan daerah, penyusunan rencana, perumusan kebijakan (publik), pelaksanaan kegiatan operasional, *monitoring* (pemantauan), pengawasan, pengendalian, evaluasi, pengukuran kinerja, perbaikan, serta penyediaan prasarana dan sarana yang cukup, sumber daya modal yang cukup, dan penyediaan sumber daya aparat pemerintah daerah yang berkemampuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru khususnya pada Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi Dokumen

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif dan pengolahan data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan.

## Pembahasan

Manajemen Parkir Tepi Jalan Umum oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun 2013

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, keberadaan parkir liar di Kota Pekanbaru masih belum dapat ditertibkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Senyatanya, di area jalan-jalan protokol terdapat rambu-rambu lalu lintas dilarang berhenti dan parkir di tepi jalan umum. Akibatnya, sering terjadi kemacetan lalu lintas . Salah satunya, adalah parkir di Jl. Jendral Sudirman tepatnya di depan Mall Pekanbaru, di Jalan Pepaya didepan Plaza Citra dan area parkir Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Pasar Cik Puan

Manajemen atau pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru masih belum efektif dikarenakan masih terdapat adanya parkir liar dan pungutan parkir yang tidak sesuai dengan aturan sehingga berdampak terhadap PAD Retribusi Parkir yang tidak pernah mencapai target. Disinilah bisa dilihat mengapa manajemen parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum efektif. Dalam penelitian ini dapat dilihat pada sub indikator yang akan dijelaskan dalam penelitian ini yaitu :

#### A. Perencanaan (*planning*)

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 8 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru pasal 8 dan 9 merupakan tugas, pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran salah satunya dalam perencanaan ialah “melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, bahwa UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru tidak memiliki perencanaan kerja tertulis dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru, UPTD Perparkiran hanya terfokus pada peningkatan hasil PAD (pendapatan asli daerah) dari pengelolaan parkir tepi jalan umum serta pengawasan parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru .

B. Pengorganisasian (*organizing*)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir di tepi jalan umum diserahkan kewenangan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru kemudian dalam pelaksanaan teknisnya diserahkan ke UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) Perparkiran selanjutnya pengelolaannya itu diserahkan ke pihak ke-3 atau bisa disebut juga koordinator parkir dengan melaksanakan kontrak kerja sama sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru diserahkan kepada Pihak ketiga/koordinator parkir sesuai dengan tanggung jawab diwilayahnya.

C. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum belum dapat dikelola dengan baik dan belum berjalan efektif oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Masih banyaknya lokasi-lokasi parkir liar yang bermunculan di Kota Pekanbaru. Dalam hal pelaksanaannya parkir tepi jalan umum masih harus dibenahi dengan maksimal dikarenakan tidak tepatnya sasaran pengelolaan yang diberikan kepada juru parkir yang tidak sesuai dengan aturan berlaku. Melihat lokasi parkir tepi jalan umum di Jalan Tuanku Tambusai atau di Pasar Cik Puan merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan yang selalu mengakibatkan kemacetan lalu lintas padahal sudah ada rambu jalan dilarang berhenti di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa UPTD Parkir menyadari hal itu dan belum bisa memberikan solusi terhadap parkir di tepi jalan umum di Pasar Cik Puan karena akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

D. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengawasan merupakan proses pengamatan, pemeriksaan dan pengendalian, dan pengoreksian pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah di

tetapkan. Dalam hal pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru belum bisa melakukan penindakan dengan maksimal dikarenakan belum memilikinya lahan parkir/gedung parkir khusus tepi jalan umum. Belum adanya lahan parkir khusus di tepi jalan umum tidak bisa memberikan sanksi yang tegas karena belum memiliki lahan parkir tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa dalam penelitian ini yang mencakup manajemen parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kota Pekanbaru tahun 2013 dapat disimpulkan manajemen atau pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dilakukan pemerintah DISHUBKOMINFO khususnya UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) Perparkiran yang belum berjalan efektif karena tidak memiliki rencana kerja tertulis dan program-program dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam hal pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru belum maksimal melakukan pengawasan karena belum mempunyai fasilitas lokasi parkir khusus atau gedung parkir untuk pengendara parkir di tepi jalan umum.

### **Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada, penulis memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan masukan dan pertimbangan agar manajemen parkir tepi jalan umum Kota Pekanbaru dapat dikelola dengan lebih baik, yaitu sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Khususnya UPTD Parkir harus melakukan penyusunan rencana kerja dengan terperinci agar jelas kemana arah tujuan pencapaian manajemen parkir tepi jalan umum.
- b. Dishubkominfo secara aktif mendata lokasi-lokasi parkir liar agar pengelolaan parkir tepi jalan umum bisa berjalan dengan efektif dan lebih tertib.
- c. Proses perekrutan dilaksanakan secara selektif dan tepat agar membantu pendataan yang jelas sehingga juru parkir lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
- d. Melakukan pengawasan secara tegas dan berkesinambungan dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum
- e. Membangun gedung parkir atau fasilitas lahan parkir khusus tepi jalan umum agar pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih teratur dan tertib.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Kencana Syafiie, Inu. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Pontoh, Nia Kurniasih, dan Iwan Kustiwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Supriatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang: CV. Media Brilian
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Tim Litbang Kompas. 2008. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara

### **Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

### **Skripsi dan Jurnal Penelitian**

- Ramadani, Fitri. 2014. “Peran Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Tahun 2013”. Skripsi. Pekanbaru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- Sandi Hertanto, Dr. Kushandayani, MA, Dra.PujiAstuti, M.Si, Dr. Reni Windiani, MS :Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara.
- Safitri, Benita. 2012. “Pengelolaan Parkir *On Street* oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta (Studi Kawasan Parkir *On Street* Melawai, Jakarta Selatan)”. Skripsi. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### **Sumber lain**

- RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun 2013-2017
- <http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/dishub-pekanbaru-harus-benahi-masalah-parkir>. 20 Mei 2014 pukul 20.35 WIB
- <http://www.inforiau.co/mobile/detailberita/3558>. 15 September 2014 pukul 21.40